

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan umum bahwa koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dalam optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kota Makassar secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun kesimpulan secara terperinci untuk masing-masing aspek dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Aspek mudah/tidaknya masalah dikendalikan

Pada aspek mudah/tidaknya masalah dikendalikan, pelaksanaan koordinasi dan supervisi dalam optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kota Makassar masih terdapat permasalahan yang sering terjadi diantaranya adalah resistensi dari pelaku usaha, lemahnya pengawasan terhadap alat rekam pajak, partisipasi masyarakat yang rendah, adanya oknum yang menghalangi pelaksanaan kegiatan, dan juga adanya bencana non-alam dalam hal ini adalah pandemi *covid-19*.

2. Aspek kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi

Pada aspek kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, pelaksanaan koordinasi dan supervisi dalam optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kota Makassar, tujuan dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dalam optimalisasi penerimaan daerah menurut hemat penulis sudah baik, karena mengarah pada terbetuknya *good governance* pengelolaan pajak daerah. Dalam hal alokasi anggaran juga sudah jelas dan tercukupi. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah dilaksanakan hanya berdasarkan pedoman koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah, belum disusun suatu Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Aspek variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi implementasi

Pada aspek variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi implementasi, kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi serta dukungan publik sangat berpengaruh dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi dalam optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kota Makassar.

B. Saran

Dari hasil penelitian terhadap koordinasi dan supervisi dalam optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kota Makassar, dapat dikemukakan rekomendasi ataupun saran-saran sebagai berikut.

1. Aspek mudah tidaknya masalah dikendalikan

Terdapat 2 rekomendasi dalam aspek ini, yaitu: *Pertama*, Komisi Pemberantasan Korupsi RI melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk menerbitkan peraturan yang mengatur tentang *reward and punishment* sehingga peran laskar peduli pajak yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan kepada para pelaku usaha dapat lebih optimal, karena tidak hanya melakukan pengawasan saja melainkan dapat juga melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan baik bagi pelaku usaha maupun oknum yang menghalangi pelaksanaan program ini. *Kedua*, Komisi Pemberantasan Korupsi RI melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak.

2. Aspek kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi

Peraturan teknis terkait pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi diharapkan dapat segera direalisasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI sebagai upaya legalisasi atas pelaksanaan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

3. Aspek variabel lain diluar kebijakan

Untuk dapat meningkatkan partisipasi publik, Komisi Pemberantasan Korupsi RI diharapkan dapat memberdayakan jaringan penyuluh anti korupsi yang terdapat di Kota Makassar untuk mengedukasi masyarakat tentang program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Prof. Said Zainal, Ph.d., MPIA. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, penerbit : CV Jejak.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuswandi, et al. 2019. *Jalan Sunyi Pemberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Politeknik STIA LAN Jakarta (2017), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan*, Jakarta: Politeknik STIALAN Jakarta.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-dasar Administrasi Publik, dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Meutia, Intan Fitri, Ph.D. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Narbuko, Kholid. 2015. *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta Langkah-langkah yang Benar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Sembilan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharjito, Didik. 2014. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syafiie, Inu Kencana. 2008. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Tachjan, Dr. H. M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: ALPI Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset.
- Taufiqurokhman, DR., S.Sos., M.Si. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku*

Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Wahab, Solichin Abdul, Prof.Dr.H.M.A. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

B. Publikasi

Abdal, M.Si. 2015. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Diansyah, Febri, Emerson Yuntho, dan Donal Fariz. 2011. Laporan Penelitian: Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW).

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Laporan Akuntabilitas Kinerja 2014*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Jurnal Penelitian

Asfiyah, Siti. 2012. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengembangan Investasi di Kabupaten Probolinggo. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.

Haq, Zul Amirul. 2018. Urgensi Tugas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Hidayat, Rahmat dan Agus Suryono. 2014. *Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS*. Jurnal Reformasi, 4(1), 34-43.
- Putra, Helmi Perdana. 2019. *Implementasi Perpres 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Jawa Timur*. DIA: Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 27-45.
- Suratman, Muh. Akmal Ibrahim & Ali Fauzy Ely. 2018. *Synthesis Model on the Implementation of Public Policy in National Community Empowerment Program in Makassar and Parepare, South Sulawesi*. American International Journal of Social Science, 7(3), 40-45.
- Suhendi, Dr. Chrisna & Zaenuddin. 2015. *Analisis Survey Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah dan Pencegahannya di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi Indonesia, 4(1), 51-65.
- Syahrul. 2015. *Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. JOM Fakultas Hukum, 11(1), 1-15.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Anonim. 2002. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Anonim. 2019. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Anonim. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*.

E. Website

Kpk.go.id. *Apa itu Korupsi?*. Diakses pada 08 Mei 2021 dari <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi>.

Kpk.go.id. *Progres Renaksi Korsupgah Nasional Tahun 2018*. Diakses pada 08 Mei 2021 dari <https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2018>.

Kpk.go.id. *Progres Renaksi Korsupgah Nasional Tahun 2019*. Diakses pada 08 Mei 2021 dari <https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2019>.

Kompas.com. 2021, 4 April. Diakses pada 08 Mei 2021 dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/18/16135731/icw-tren-penindakan-kasus-korupsi-periode-2015-2020-cenderung-turun>.